

Lampiran Surat (contoh)

Nomor :

Tanggal:

Data Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Pihak Ketiga/Swasta, Kementerian, Lembaga berbadan Hukum

NO	Kerjasama Daerah/ Pihak ke III, Kementerian, Lembaga berbadan hukum	Pemrakarsa	Terpayungi Dalam Dokumen Perencanaan Alokasi Anggaran APBN/APBD	Bentuk Kerjasama/ Kesepakatan/ Perjanjian Kerjasama	Nomor/tanggal Kesepakatan Bersama	Ruang Lingkup	Difasilitasi oleh Kementerian/ Tim Koordinasi kerjasama Daerah	Realisasi Fisik/Keuangan	Permasalahan	Solusi	Keterangan /jangka waktu
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi	Dinas Perhubungan	APBD	<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan Bersama Antara Provinsi Sulawesi Barat dengan Sekolah Tinggi Transportasi darat tentang Pemenuhanan Kebutuhan Sumberdaya Manusia di Bidang Perhubungan Darat 	HK.201/14/7/STT D-2017 dan 33 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten dibidang perhubungan darat dengan pola pembibitan sesuai kebutuhan daerah mulai dari penetapan kebutuhan sampai apada pengusulan menjadi ASN, pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi PNS dibidang perhubungan 	Pemerintah Pusat melalui BPSDM Kementerian Perhubungan	Penganggaran di tahun 2022 calon taruna akademik 2021/2022	-	-	5 (Lima) Tahun
2.	UPTD KPH Mamasa Barat dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari	Dinas Kehutanan	-	Perjanjian Kerjasama Penyadapan getah pinus antara UPTD KPH Mamasa Barat dengan PT. Kencana Hijau Binalestari Kabupaten	415.4/071/KPH-MB/IV/2017 dan 028/kPBL-KPH/SB-MB/IV/2018 Tanggal 5 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Sosisalisasi pengelolaan/penyadapan sarana dan prosarana Peningkatan keterampilan tenaga penyadapan getah pinus melalui pelatihan Pelaksanaan 	Pemerintah Daerah (APL)	-	-	-	20 (dua puluh) Tahun etrhitung mulai tanggal ditandatangani PKS

				Mamasa		<ul style="list-style-type: none"> penyadapan getah pinus penungutan HHBK lainnya • Pengelolaan produk getah pinus • Pengangkutan/Pe masaran • Perlindungan dan pengamanan hutang • Rehabilitasi dan pengayaan tanaman/tegakan pinus 					
3	UPTD KPH Mamasa Tengah dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari	Dinas Kehutanan	-	Perjanjian Kerjasama Penyadapan getah pinus antara UPTD KPH Mamasa Tengah dengan PT. Kencana Hijau Binalestari Kabupaten Mamasa	415.4/33/KPH-MB/IV2017 dan 028/kPBL-KPH/SB-MTB/IV/2018 Tanggal 5 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Sosialisasi pengelolaan/penyadapan sarana dan prosarana • Peningkatan keterampilan tenaga penyadapan getah pinus melalui pelatihan • Pelaksanaan penyadapan getah pinus penungutan HHBK lainnya • Pengelolaan produk getah pinus • Pengangkutan/Pe masaran • Perlindungan dan pengamanan hutang • Rehabilitasi dan pengayaan tanaman/tegakan pinus 	Pemerintah Daerah (APL)	-	-	-	20 (dua puluh) Tahun
4.	UPTD KPH Mamasa Timur dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari	Dinas Kehutanan	-	Perjanjian Kerjasama Penyadapan getah pinus antara UPTD KPH Mamasa Timur dengan PT. Kencana Hijau Binalestari	029/74/KPH-MASTIM/IV/2017 dan 030/KHBL-KPH/SB-MTI/IV/2017 tanggal 5 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan • Sosialisasi pengelolaan/penyadapan sarana dan prosarana • Peningkatan keterampilan tenaga penyadapan getah pinus melalui 	Pemerintah Daerah (APL)	-	-	-	20 (dua puluh) Tahun

				Kabupaten Mamasa		<ul style="list-style-type: none"> • pelatihan penyadapan getah pinus penungutan HHBK lainnya • Pengelolaan produk getah pinus • Pengangkutan/Pe masaran • Perlindungan dan pengamanan hutang • Rehabilitasi dan pengayaan tanaman/tegakan pinus 					
5.	Dirjen Pengendalian DAS dan HL dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari	Dinas Kehutanan	-	Perjanjian Kerjasama pemungutan getah pinus pada kesatuan lindung unit VIII Mamasa Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan PT. Kencana Hijau Bina Lestari Kabupaten Mamasa	PKS.17/DASHL/SET/KUM.3/12/2018 Tanggal 7 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan kelestarian hasil • Pemungutan getah pinus • Penatausahaan hasil hutan (getah pinus) • Perlindungan dan pengamanan hutan • Pemberdayaan masyarakat setempat • Bagi hasil pemanfaatan hasil hutan bukan kayu • Pembayaran PNBP • Pelaporan pelaksanaan kerjasama 	Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (dalam Kawasan)	-	-	-	5 (lima) Tahun
6.	Dirjen Pengendalian DAS dan HL dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari	Dinas Kehutanan	-	Perjanjian Kerjasama Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Unit IX Mamasa Timur Provinsi Sulawesi Barat dengan PT.	PKS.1/PDAHL/KP HL/KUM.3/1/2020 003/DIR-KHBL/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan hutan • Pola bagi hasil • PKS Operasional • pelaporan 	Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (dalam Kawasan)	-	-	-	5 (Lima) Tahun

				Kencana Hijau Bina Lestari Kabupaten Mamasa							
7.	Pemerintah provinsi Sulawesi Barat dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat	Dinas Perhubungan / BKD	-	MOU/PKS Tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumberdaya Manusia dibidang perhubungan darat	HK.201/4/7/STTD -2017 dan 33 Tahun 2017	Pemenuhan Kebutuhan SDM yang berkompoten dibidang perhubungan darat dengan pola pembibitan sesuai kebutuhan daerah	Pemerintah Pusat melalui Kementerian perhubungan	Proses	-	-	5 Tahun
8.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Makassar	BKD	APBD	PKS Tentang pelaksanaan program pengembangan kompetensi sumberdaya manusia aparatur dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat	11 Tahun 2017 dan 1354/STIA.3/HKS .03/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kompetensi sumberdaya manusia aparatur melalui kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi program pasca sarjana terapan dan megister terapan dibidang administrsi • 	STIA LAN Makassar	-	-	-	5 Tahun
9.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin	BKD	APBD	MoU/PKS tentang penyelenggaraa n Program Megister pada Sekolah Pasca Sarjana Unhas	6 Tahun 2019 dan 541/UN4.20/HK.0 7/2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pola Kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pasca sarjana (S2) pada sekolah pasca sarjana Unhas 	Unhas	-	-	-	3 Tahun
10.	Gubernur Sulawesi Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia	BKD	APBD	MoU/ PKS Tentang penyelenggaraa n pendidikan dan penelitian masyarakat	870/STE- NI/MoU/XII/2017 dan 007.3/3066/SET	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua belah Pihak akan bekerjasama dalam eningkatkan kompetensi SDm melalui kegiatan pendidikan sarjana SI dan Pendidikan Megister S2 • Penelitian dan pengabdian masyarakat 	STIE - Nobel	-	-	-	4 Tahun
11	Pemerintah Provinsi	Biro Hukum / Kajati Sulbar	Tidak Tepanyungi	Perjanjian Kerjasamaantar	01/Ps6/Gs.1/01/2 022 dan 1 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Penanganan 	Biro hukum pemprov	-	Kurangnya proaktif dari	Perlunya	2 Tahun

	Sulawesi Barat dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat		dalam Dokumen Perencanaan	a Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2022 tanggal 20 januari 2022	<p>Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan hukum yaitu menugaskan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili Pihak Kesatu berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi • Pemberian bantuan hukum yaitu menugaskan Jaksa pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan atau Pendampingan (Legal Assistance?LA) dibidang perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan pihak Kesatu • Tindakan hukum lain yaitu menugaskan JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Pihak Kesatu dengan lembaga Negara, instansi pemerintah 	Sulbar dan konsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri		pemerintah daerah	upaya prventif masalah hukum yang timbul	
--	---	--	---------------------------	---	------------------------------	---	--	--	-------------------	--	--

						pusat/daerah, BUMN/BUMD dibidang perdata dan TUN					
12	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan BSSN	Diskominfo/Di nas Perpustakaan		Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik Pada Sistem Elektronik Srikandi	2 Tahun 2022 PERI.96/BSSN/B S/HK.07.02/06/20 22	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Infrastruktur dan teknologi informasi yang mendukung sertifikat elektronik pada layanan pemerintah • Penyerahan sertifikat elektronik • Pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik pemerintah pada pihak kesatu • Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia 	Tim TKKSD Provinsi dan BSSN	-	-	-	4 (empat) Tahun

Kepala Perangkat Daerah

Nama :

Pangkat :

Nip :